



Permasalahan Penerapan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar

Abdul Hakim Hidayat¹, Anisa Rahmi², Nyai Ai Nurjanah³,
Yusuf Fendra⁴, Wismanto⁵
Universitas Muhammadiyah Riau

Gmail : abdulhakimhidayat2872@gmail.com¹, nisarhmi288@gmail.com²,
nyaiainurjanah19@gmail.com³, ilanistiano@gmail.com⁴, wismanto29@umri.ac.id⁵

Abstract: Inclusive education is a critical issue in Indonesia, especially considering the high number of Children with Special Needs (CSN). Despite existing legal frameworks regulating inclusive education, its implementation remains limited, particularly at the Elementary School level. This study aims to explore the challenges faced in implementing inclusive education in Elementary Schools and evaluate the obstacles encountered by schools and teachers. The literature review method was employed to collect data through the analysis of various journals, books, and documents relevant to the research topic. The findings indicate numerous challenges in the implementation of inclusive education in Elementary Schools, including inadequate teacher competencies, lack of supporting facilities, insufficient tailored curricula, and the diverse characteristics of CSN requiring different approaches. Further efforts are needed to improve the inclusive education system in Indonesia to address these challenges.

Keywords: Inclusive education; Implementation challenges; Teachers and supporting facilities.

Abstrak: Pendidikan inklusi merupakan isu penting di Indonesia, terutama dengan jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang masih tinggi. Meskipun telah ada landasan hukum yang mengatur pendidikan inklusi, implementasinya masih terbatas, terutama di Sekolah Dasar. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar serta untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi oleh sekolah dan guru. Metode studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data melalui analisis berbagai jurnal, buku, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam implementasi pendidikan inklusi di Sekolah Dasar, termasuk kurangnya kompetensi guru, minimnya fasilitas pendukung, kurangnya kurikulum yang disesuaikan, serta beragamnya karakteristik ABK yang memerlukan pendekatan yang berbeda. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki sistem pendidikan inklusi di Indonesia guna mengatasi tantangan ini.

Kata Kunci: Pendidikan inklusi; Tantangan implementasi; Guru dan fasilitas pendukung.

PENDAHULUAN

Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia masih cukup tinggi, dengan perkiraan sekitar 1,6 juta anak menurut data BPS tahun 2017. Namun, hanya sedikit dari mereka yang mendapatkan layanan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar, dengan hanya 18 % anak yang dilaporkan mendapatkannya menurut laman kemendikbud.go.id (Kompas, 2019). Pendidikan merupakan hak bagi semua individu, termasuk ABK, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menggarisbawahi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang setara, termasuk mereka yang memiliki keberagaman fisik, emosional, intelektual, internal, atau sosial.

Konseptualnya, pendidikan inklusif menempatkan ABK untuk belajar di sekolah umum bersama dengan teman sebaya mereka, sebagai alternatif terhadap pendidikan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB). Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi diskriminasi dan

memungkinkan ABK untuk berkembang secara maksimal dengan interaksi dan sosialisasi yang lebih luas. Pendidikan inklusi telah diimplementasikan di Indonesia, bahkan hingga tingkat Sekolah Dasar, namun masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan. Permasalahan utama meliputi kurangnya kompetensi guru dalam menghadapi ABK, minimnya fasilitas pendukung, kurangnya kurikulum yang disesuaikan, dan beragam karakteristik ABK yang memerlukan pendekatan yang berbeda.

Pentingnya kajian lebih lanjut terkait permasalahan yang dihadapi di Sekolah Dasar terkait penerapan pendidikan inklusi menegaskan pentingnya pemahaman mendalam terhadap kendala dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah dan guru. Ini menjadi dasar untuk upaya perbaikan yang lebih terarah dan efektif dalam mendukung pendidikan inklusi di Indonesia.

METODE

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kepustakaan atau library research. Pendekatan studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menyusun ulang pemikiran dari berbagai penelitian terdahulu dan referensi ilmiah yang terkait dengan topik penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Hermawan (2019). Dalam studi kepustakaan, peneliti mengakses pembahasan-pembahasan dan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang serupa atau terkait dengan topik penelitian mereka.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi sejumlah jurnal, buku, dokumen, serta sumber-sumber data dan informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Proses ini mencakup identifikasi teori secara sistematis, penemuan literatur yang relevan, dan analisis dokumen yang mengandung informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan dalam penerapan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar dapat dijabarkan dalam beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Peserta didik

Menurut definisi yang umumnya diterima, Peserta didik merujuk kepada individu yang terlibat dalam proses pembelajaran sepanjang hidupnya. Namun, dalam konteks bahasa sehari-hari, peserta didik mengacu pada siswa yang berada dalam lingkungan sekolah. Peserta didik menjadi subjek utama dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, sehingga penting bagi para pendidik untuk memperlakukan dan memahami

peserta didik sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Pendidikan memiliki tujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Arti dari pendidikan sendiri adalah usaha yang mengarahkan manusia untuk mencapai potensi maksimalnya (Ilahi & Rose, 2013). Beberapa masalah yang terkait dengan peserta didik telah diidentifikasi oleh Agustin (2019), termasuk:

- a. Kehadiran anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan beragam masalah yang berbeda dalam satu kelas dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam menyediakan layanan yang efektif.
- b. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mengalami kesulitan dalam mengikuti proses belajar dengan baik, yang disebabkan oleh kesenjangan yang signifikan dalam kemampuan akademik antara mereka dan anak-anak reguler. Hal ini menuntut penyesuaian yang cukup banyak dalam pendekatan pembelajaran bagi ABK tersebut.
- c. Sikap anak berkebutuhan khusus (ABK) yang belum mampu mengikuti aturan dapat mengganggu proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yang sedang berlangsung.
- d. Permasalahan yang muncul dari siswa reguler terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) sering kali berkaitan dengan kurangnya empati dan kesadaran terhadap tantangan yang dihadapi oleh anak ABK tersebut (Rizki Ailulia, 2021).

2. Kurikulum

Kurikulum pendidikan inklusi mengusung prinsip fleksibilitas, di mana kurikulum tersebut disesuaikan dengan kebutuhan individual setiap peserta didik dan diadaptasi sesuai dengan karakteristik lembaga pendidikan yang bersangkutan, tanpa mengabaikan pedoman yang telah ditetapkan. Implementasi kurikulum pada pendidikan inklusi bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, kemampuan berpikir kritis, dan mempromosikan nilai-nilai kebersamaan di lingkungan pendidikan. Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, berbeda dengan praktik yang terjadi sebelumnya di mana peserta didik dipaksa untuk mengikuti kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketidaksesuaian kurikulum pembelajaran dan penilaian dengan kebutuhan anak. Kurikulum yang sesuai untuk pendidikan inklusi adalah kurikulum yang dimodifikasi, yaitu kurikulum standar bagi peserta didik reguler yang telah disesuaikan dengan kemampuan awal dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus (Noviandari et al., 2021). Berdasarkan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Siswa yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan serta bakat istimewa,

satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan inklusi menggunakan kurikulum tingkat satuan.

Pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan potensi siswa sesuai dengan bakat dan minatnya merupakan suatu prinsip yang diungkapkan oleh Yuly Sakinatul Karomah (2022). Selain itu, Menteri Pendidikan juga diharapkan memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik belajar siswa, serta penilaian hasil belajar yang mengacu pada kurikulum yang relevan. Siswa yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan melebihi standar nasional pendidikan, wajib mengikuti ujian nasional. Namun, siswa yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum di bawah Standar Nasional pendidikan akan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Karena anak berkebutuhan khusus menggunakan standar kurikulum nasional yang sama dengan siswa reguler, maka standar penilaian siswa ABK juga harus mengikuti standar penilaian siswa reguler. Akibatnya, beberapa anak berkebutuhan khusus mungkin tidak dapat lulus karena standar penilaian tersebut tidak mempertimbangkan tingkat kecerdasan mereka yang berbeda.

3. Tenaga pendidik

Menurut Tarnoto (2016), dalam pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan inklusi di Sekolah Dasar, banyak permasalahan yang muncul terkait pemahaman guru. Permasalahan utama yang sering disoroti oleh tenaga pendidik adalah kurangnya ketersediaan Guru Pendamping Kelas (GPK). Selain itu, kurangnya kompetensi praktisi dalam mengelola anak berkebutuhan khusus (ABK) juga menjadi masalah utama, menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Pemahaman yang kurang dari tenaga pendidik tentang cara menghadapi ABK di Sekolah Inklusi juga menjadi hambatan. Latar belakang pendidikan praktisi yang tidak sesuai dan beban administrasi yang semakin bertambah juga menyulitkan tenaga pendidik. Kesabaran yang kurang dalam menghadapi ABK dan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang tua merupakan permasalahan tambahan yang dihadapi oleh tenaga pendidik.

Permasalahan yang muncul juga mencakup kurangnya pengetahuan dalam menangani anak berkebutuhan khusus, terutama karena mayoritas tenaga pendidik berasal dari latar belakang pendidikan umum, bukan pendidikan khusus. Kurangnya pengetahuan yang detail tentang cara mengatasi kebutuhan khusus anak menjadi salah satu dampaknya.

Faktor lain yang menghambat pelaksanaan program pendidikan inklusi adalah kurangnya kesesuaian kurikulum yang belum dirancang khusus untuk program sekolah inklusi, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik. Di samping itu, fasilitas pendukung di sekolah yang belum memadai juga menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus (Setianingsih & Listyarini, 2019).

4. Kegiatan Pembelajaran

Ketidakadopsian sistem *platoon tutoring* dalam proses pembelajaran telah menyebabkan anak berkebutuhan khusus menghadapi kesulitan dalam menyerap materi pelajaran. Sistem *platoon tutoring* menjadi penting untuk memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antara anak-anak, yang membantu mereka menjadi lebih terstruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Namun, permasalahan terkait sistem pengajaran dalam pendidikan inklusi di sekolah dasar masih belum memberikan jaminan atas keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam memahami materi pelajaran. Hal ini terutama disebabkan oleh keterbatasan fasilitas dan media pembelajaran yang belum lengkap (Elfiana & Widiyono, 2022).

Dalam konteks pembelajaran, perubahan perilaku yang positif dari peserta didik merupakan tujuan utama. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan lingkungannya, di mana peserta didik berinteraksi dengan teman-temannya untuk bersosialisasi. Interaksi tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal dan internal. Oleh karena itu, tugas utama praktisi pendidikan adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik (Hera, 2018). Dalam penelitian sebelumnya oleh Hera (2018), kegiatan belajar-mengajar di kelas menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa.

Metode yang diterapkan dalam proses pengajaran tidaklah rumit, namun dipilih berdasarkan perkiraan sesuai dengan karakteristik siswa ABK serta siswa lainnya agar tujuan pembelajaran mudah tercapai. Dalam pendekatan klasikal, tenaga pendidik menggunakan metode yang sederhana namun efektif untuk memastikan pemahaman siswa, meskipun perlu pendekatan khusus terhadap siswa ABK karena mereka cenderung memiliki tipe *slow learner* yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari praktisi pendidikan. Tenaga pendidik di kelas juga sering mengalami kesulitan dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai. Mereka harus mempertimbangkan keberadaan siswa ABK yang perlu disesuaikan dengan siswa reguler lainnya, namun tetap berusaha memilih metode yang tepat agar pemahaman dapat diperoleh oleh sebanyak mungkin siswa.

Bahkan ketika ada siswa yang masih belum memahami, praktisi pendidikan tetap sabar dalam memberikan bimbingan.

Proses belajar-mengajar di kelas disesuaikan agar nyaman bagi peserta didik, bahkan ketika mereka ingin pindah tempat duduk karena merasa bosan. Sumber belajar juga dibuat semenarik mungkin agar disukai oleh peserta didik, tetapi tetap memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan.

Tingkat pemahaman anak berkebutuhan khusus (ABK) terhadap materi pembelajaran memang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat kecerdasan mereka, namun tenaga pendidik berusaha semaksimal mungkin agar semua murid dapat memahami materi pelajaran yang disampaikan. Tenaga pendidik perlu pandai dalam merancang strategi yang sesuai dengan kebutuhan individu, termasuk strategi untuk memusatkan perhatian, mengatasi masalah, dan lain-lain. Karena peserta didik dengan kekhususan dalam aspek fisik, emosional, dan lainnya memiliki perkembangan yang berbeda dengan anak normal, variasi karakteristik siswa juga memunculkan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peran dan perhatian dari berbagai pihak, termasuk praktisi pendidikan sebagai tenaga pendidik yang berinteraksi langsung dengan siswa, sangatlah penting (Asiyah, 2018).

5. Manajemen sekolah

Manajemen pendidikan inklusi melibatkan serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan. Di sekolah inklusi, manajemen pendidikan memberikan wewenang penuh kepada kepala sekolah untuk mengatur berbagai aspek penyelenggaraan, seperti siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, fasilitas, pembiayaan, serta hubungan dengan masyarakat (Zaini, 2022).

Namun, sejumlah permasalahan terkait manajemen pendidikan inklusi diidentifikasi oleh Agustin (2019). Salah satunya adalah bahwa perencanaan pengelolaan pendidikan inklusi belum melibatkan praktisi dan personel lain secara menyeluruh. Pengorganisasian dalam pembagian tugas belum optimal dilakukan oleh praktisi yang bertugas, dan pengawasan terhadap kegiatan atau program masih belum dilakukan secara menyeluruh.

Sekolah juga belum sepenuhnya siap untuk mengimplementasikan program inklusi, baik dari segi administrasi maupun sumber daya manusia (SDM). Proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) juga belum berjalan secara optimal. Selama ini, anak berkebutuhan

khusus (ABK) belum mendapatkan layanan dan program khusus dari sekolah untuk mengembangkan potensi mereka.\

6. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana memegang peran penting dalam mendukung kesuksesan pendidikan inklusif di berbagai lembaga pendidikan, seperti yang disoroti oleh David Wijaya (2019). Ketersediaan sarana dan prasarana memiliki dampak yang signifikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, mengingat ketergantungan mereka pada media pembelajaran. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan yang unik, sehingga sekolah inklusif perlu menyediakan berbagai jenis media pembelajaran yang beragam. Namun, masalah utama muncul karena banyak sekolah inklusif yang belum dapat memenuhi kebutuhan akan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK) (Agustin, 2019).

Selain itu, penggunaan media pembelajaran adaptif belum dimanfaatkan secara optimal, dan sering kali hanya tersedia media standar yang ditujukan untuk peserta didik reguler. Hal ini berarti tidak adanya media khusus yang dapat mendukung pembelajaran bagi peserta didik ABK agar lebih mudah memahaminya (Hera, 2018).

7. Kerjasama

Kerjasama yang dimaksud adalah kolaborasi antara sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi, pemerintah, dan wali murid. Nurcahyani (dalam Intan et al., 2020) menyatakan bahwa peran aktif pemerintah dalam pelaksanaan sekolah inklusi masih kurang. Beberapa aspek yang menjadi sorotan meliputi ketidakjelasan kebijakan terkait pelaksanaan sekolah inklusi, kurangnya modifikasi kurikulum khusus untuk sekolah inklusi, serta kekurangan pelatihan tentang pendidikan inklusi bagi praktisi. Perhatian pemerintah terhadap tenaga profesional yang mendukung sekolah inklusi juga dinilai belum memadai, baik dalam hal jumlah maupun kesejahteraan mereka. Program-program yang dijalankan pemerintah juga dianggap belum berkelanjutan, dan belum ada lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan pendampingan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK).

Penyelenggaraan pendidikan inklusi juga melibatkan kerjasama antara sekolah dan wali murid, yang dalam konteks ini adalah keluarga. Peran keluarga sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran peserta didik, terutama ABK (Widiyono, 2022). Namun, pada kenyataannya, sebagian besar orang tua dari anak berkebutuhan khusus

mengalami kesulitan dalam memberikan pendampingan belajar bagi anak mereka di rumah. Mereka sering kali sibuk dengan karier dan pekerjaan di luar rumah, sehingga interaksi yang intens antara orang tua dan anak menjadi terbatas (Khotimah, 2019). Berbagai masalah lainnya juga muncul, termasuk kurangnya pemahaman orang tua terhadap ABK, rasa malu yang mendorong orang tua untuk menempatkan anak mereka di sekolah reguler, kurangnya toleransi dari wali murid siswa reguler terhadap ABK, kurangnya kesabaran orang tua terhadap anak yang berkebutuhan khusus, serta kondisi pengasuhan oleh orang tua tunggal (Intan et al., 2020).

8. Masyarakat

Kondisi lingkungan masyarakat yang beragam, dengan perbedaan latar belakang pendidikan, profesi, dan lain-lain, menghasilkan respons yang beragam terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus. Secara umum, masih ada sebagian masyarakat yang memandang anak berkebutuhan khusus sebagai anak yang aneh. Karena itu, saat berinteraksi atau bertemu dengan anak berkebutuhan khusus di lingkungan masyarakat, mereka cenderung mengabaikannya atau bahkan menghindarinya. Fenomena ini mencerminkan kurangnya perhatian dan kepedulian dari masyarakat terhadap pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, karena masih ada pandangan negatif yang beredar di masyarakat secara luas (Intan et al., 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pendidikan inklusi di Sekolah Dasar menghadapi sejumlah tantangan terkait dengan delapan komponen utama: peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, kegiatan pembelajaran, manajemen sekolah, sarana dan prasarana, kerjasama dengan masyarakat, serta kurangnya dukungan infrastruktur bagi sekolah inklusi. Salah satu tantangan utama adalah kekurangan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah atau instansi terkait, dan orang tua atau wali murid.

Fokus utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah peran tenaga pendidik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan forum terkait untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dalam memberikan layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ini termasuk kemampuan mereka dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif, menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, mengembangkan kurikulum tambahan yang sesuai dengan kemampuan mereka, dan membangun kerjasama yang kuat dengan orang tua atau wali murid.

Selain itu, dukungan dari lembaga sekolah dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah juga diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung sehingga sekolah dapat memberikan layanan terbaik bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. (2019). Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SDN Se Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. *ELSE (Elementary School Education Journal): Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 3(2), 17–26.
- Asiyah, D. (2018). Dampak pola pembelajaran sekolah inklusi terhadap anak berkebutuhan khusus. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 1(01).
- David Wijaya, S. E. (2019). *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*. Prenada Media.
- Hera, E. (2018). Permasalahan Sekolah Dasar Inklusi Di Kelas Atas SD Sukallmu Wilayah Kabupaten Progo. In *Skripsi*.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran.
- Ilahi, M. T., & Rose, K. R. (2017). *Pendidikan inklusif: konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: Arruz Media
- Intan, I., Jaya, G. P., & Jamaludin, G. M. (2020). Problematika Guru Dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Sd Inklusi Taman Siswa Rejang Lebong. *Jurnal Fundadikdas (Fundamental Pendidikan Dasar)*, 3(2), 113–126.
- Kemendikbud. (2022). *Data Sebaran Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI) Jenjang SD*.
<https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/data-sebaran-satuan-pendidikan-penyelenggara-pendidikan-inklusif-spppi-jenjang-sd>
- Khotimah, H. (2019). Problematika Pelaksanaan Pembelajaran Inklusi di SDN Betet 1 Kediri. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 5(2), 84–103.
- Kompas. (2019). *Hari Disabilitas Internasional, Nadiem: Guru Harus Pahami Prinsip Pendidikan Khusus*.
<https://amp.kompas.com/edukasi/read/2019/12/03/07150021/hari-disabilitas-internasional-nadiem-guru-harus-pahami-prinsip-pendidikan>
- Noviandari, H., Masruroh, F., & Psy, M. P. (2021). *Cooperative Positive Learning Dalam Pendidikan Inklusi*. Penerbit Lakeisha.
- Pratiwi. (2015). Sekolah Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus : Tanggapan Terhadap Tantangan Ke Depan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* (pp. 237-242). Surakarta: UNS&ISPI Jawa Tengah
- Rizki Ailulia, A. W. (2021). Studi Kasus : Penangan Masalah School refusal melalui Teknik Self Instruction pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Konseling Indonesia*, 7(1), 29–38.

- Setianingsih, E. S., & Listyarini, I. (2019). Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Di Sd Bina Harapan Semarang. *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 3(1), 257–268.
- Sleman, D. (2018). *Penerapan Program Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas Di Sekolah*.
- Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada tingkat SD. *Humanitas: Jurnal Psikologi Indonesia*, 13(1), 50–61.
- Ulfa Meila Elfiana, Aan Widiyono, E. Z. (2022). Pengaruh Penggunaan Media Pop Up Book Alim (Alat Indra Manusia) terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD Negeri 4 Tunahan Jepara. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 523–527. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Widiyono, A. (2022). Kegiatan Cooking Class untuk Menumbuhkan Kemandirian dan Tanggung Jawab. *PRATAMA WIDYA : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(1), 59–68.
- Yuly Sakinatul Karomah, A. W. (2022). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Emosi Siswa. *SELING Jurnal Program Studi PGRA*, 8(1), 54–60.